

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDES) PANGKALAN SERAI KECAMATAN  
KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Devi Fitri  
NPM : 167110231**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Devi Fitri  
NPM : 167110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Pekanbaru, 13 Juni 2022  
Pembimbing,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

N a m a : Devi Fitri  
NPM : 167110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota,

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

# SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

N a m a : Devi Fitri  
NPM : 167110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, 13 Juni 2022

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

# PERSEMBAHAN

*Dengan bersyukur atas limpahan rahmat-Mu ya Allah, segala petunjuk dari-Mu menuntunku menuju kejalan-Mu.*

*Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat betapa besarnya keagungan-Mu Ya Allah.*

*Sembah sujudku dan seiring syukur pada-Mu ya Allah, Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....*

*Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....*

*Serta untuk semua teman-teman seangkatan prodi Administrasi Publik Angkatan 2016 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari kalian dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini....*

*Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.*

*Terima kasih untuk semuanya.....*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.

4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
5. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi serta membimbing penulis dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Pemerintah Desa Pangkalan Serai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
9. Ayahanda Marsani dan Ibunda Malini tercinta, serta kepada Albi yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Keluarga Besar AP Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman seperjuangan satu kelas dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 13 Juni 2022  
Penulis  
Ttd.

Devi Fitri

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	17
A. Studi Kepustakaan .....	17
1. Konsep Administrasi .....	17
2. Konsep Organisasi.....	19
3. Konsep Manajemen.....	20
4. Konsep Pengelolaan .....	21
5. Konsep Desa.....	23
6. Konsep Alokasi Dana Desa.....	23
7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa .....	25
B. Kerangka Pikir .....	26
C. Konsep Operasional.....	27
D. Operasional Variabel .....	28
E. Teknik Pengukuran.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Teknik Penarikan Sampel.....	34
E. Jenis dan Sumber Data .....	34

F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	38
B. Gambaran Umum Demografi Kabupaten Kampar .....	39
C. Gambaran Umum Agama Kabupaten Kampar .....	41
D. Gambaran Umum Peristiwa Kabupaten Kampar .....	41
E. Sejarah Desa Pangkalan Serai .....	42
F. Profil Desa Pangkalan Serai .....	43
G. Keadaan Penduduk Desa Pangkalan Serai .....	44
H. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Pangkalan Serai .....	44
I. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pangkalan Serai .....	47
J. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Serai .....	48
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Identitas Responden .....	49
1. Jenis Kelamin .....	49
2. Tingkat Pendidikan .....	50
3. Tingkat Usia .....	51
B. Hasil Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	52
1. Perencanaan .....	52
2. Pelaksanaan .....	55
3. Penatausahaan .....	59
4. Pelaporan .....	62
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Aparatur Desa di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	8
I.2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	9
I.3 : Belanja Desa Tahun 2019 Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	10
I.4 : Program Pembangunan Desa Pangkalan Serai Yang Sudah Terlaksana dan Belum Terlaksana .....	14
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	29
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	34
IV.1 : Keadaan Penduduk Desa Pangkalan Serai Berdasarkan Mata Pencaharian .....	45
IV.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pangkalan Serai .....	46
IV.3 : Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pangkalan Serai .....	46
IV.4 : Pejabat Struktural Pemerintah Desa Pangkalan Serai .....	47
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	50

V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Usia.....	51
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perencanaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	53
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	56
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	60
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaporan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	63
V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	26
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	77
2. Daftar Wawancara Penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	83
3. Daftar Telly Penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	85
4. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	87

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Fitri  
NPM : 167110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022  
Pelaku Pernyataan,

Devi Fitri

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDES) PANGKALAN SERAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

**Oleh  
Devi Fitri**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini dijadikan bahan utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas penelitian ini. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah menggunakan persentase dengan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian Cukup Terlaksana. Faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Serai. Kemudian pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan realisasi pengelolaan APBDes Pangkalan Serai. Dan Pemerintah Desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, namun hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun.

Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**THE VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET  
MANAGEMENT (APBDES) PANGKALAN SERAI VILLAGE  
KAMPAR KIRI HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY**

**ABSTRACT**

**By  
Devi Fitri**

*This study aims to determine and analyze the Village Budget Management (APBDes) Pangkalan Serai Village Kampar Kiri Hulu District Kampar Regency. The assessment indicators used include planning, implementation, administration and reporting. This type of research is a descriptive survey, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this tool is used as the main material to analyze the empirical conditions and objectivity of this study. The population and sample in this study amounted to 20 people. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using questionnaires and interviews, and secondary data using observation and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used is using percentages with a frequency table tool. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Village Budget Management (APBDes) of Pangkalan Serai Kampar Kiri Hulu District Kampar Regency was in the category of Sufficiently Implemented. The inhibiting factor is the lack of communication and dissemination of information between village government officials and the community, thus making the public not aware of the funds that have been budgeted by the government to carry out development and empowerment of the Pangkalan Serai Village community. Then the management of APBDes in Pangkalan Serai Village is still less transparent. This can be seen from the absence of deliberation conducted by the village government with the community regarding the report on the realization of the Pangkalan Serai APBDes management. And the Pangkalan Serai Village Government does not close the books at the end of every month, but only closes the books once a year.*

*Keywords: Management, Village Revenue and Expenditure Budget;*

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Keuangan tersebut untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih disebutkan bahwa keuangan desa merupakan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.

Menurut Wiranta (2015:33) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dari pelaksanaan berupa rencana rencana program kegiatan yang di biayai dengan uang desa.

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 menyatakan bahwa. Dana desa (ADD) adalah dan yang bersumber dari anggaran

dan belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa mengelolah keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelolah keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelolah pendapatan maupun mengelolah pembelanjaan anggran.

Peraturan Bupati Kampar 08 tahun 2017 tentang standar harga dan biaya operasional. Standar harga satuan biaya operasional kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017. Menimbang bahwa dalam rangka penyusunan rencana anggaran, biaya anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggran 2017 diperlukan standar harga satuan biaya operasional. Standar harga satuan biaya operasional kegiatan anggran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 dipergunakan oleh pemerintah Desa Dilingkungan Pemerintah Pangakalan Serai

Kabupaten Kampar sebagai acuan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Hal tersebut diatur berlandaskan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan Bupati Kampar Nomor 77 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan penggunaan alokasi dana desa, dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2017. Terkait standar satuan biaya operasional APBdes kabupaten kampar kiri hulu tahunanggran 2017.

Tingginya anggaran desa sering kali disalahgunakan oleh pihak – pihak tidak bertanggungjawab khususnya pemerintah tingkat desa (kelurahan) yang berujung pada kasus hukum. Sejumlah pengamat hukum menilai banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum. Khususnya korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja mereka. Selain itu, rata – rata desa yang menduduki jabatan tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mengenai tentang pengelolaan keuangan desa. Khususnya yang dialami kepala desa berawal dari ketidaktahuan mereka dalam menjalankan pesan menjalankan pesan pemerintahan.

Wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri, Menurut Zulkifli ( 2009 : 9 ) Konsep Admistrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.

Suatu organisasi yang dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-

sumberdaya organisasi secara teratur dan benar. Organisasi menurut Kenneth Wexley dan Yuki ( 2005:35 ) Organisasi dalam pandangan beberapa pakar seolah-olah menjadi suatu “binatang” yang berwujud banyak, namun tatapi memiliki kesaamaan konseptual.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry 2015;12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan orang lain. Dalam hal ini jika tujuan yang ingin dicapai memperoleh hasil yang diterapkan, maka dibutuhkan aminulasi atau sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan maksimal.

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu wadah diman administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsinya, pada hakikatnya, negara merupakan sebagian organisasi yang didalamnya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pencapai tersebut tentunya harus jalan beriringan antara kepala dan ekor, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam satu misi, guna tercapai tujuan yang diinginkan.

Selain daripada itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata adminitrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang disebut dengan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonomi pemerintahan level terendah yang diberi

wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan perataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan dana desa berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang pencapaian prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pembangunan sarana dan prasana desa
- Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (undang-undang nomor tahun 2015 pasal 1). Dalam penggunaan alokasi dana desa, memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa digunakan sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royang dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam pancasilah demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh parah pelaku da masyarakat desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi menajemen pada setiap proses Pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Desa Pangkalan Serai masih terdapat beberapa permasalahan mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit berdasarkan dari data APBDes yang ada Didesa Pangkalan Serai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pangkalan Serai Tahun 2019.

Desa Pangkalan Serai letaknya dipelosok kabupaten Kampar, Riau Di sana tak ada sinyal. Tak ada jalan darat kesan sungai satu – satunya jalur tranportasi. Sehingga negeri ini tak pernah ditempuh mobil dan sepeda motor. Di kecamatan Kampar Kiri Hulu, Desa Pangkalan Serai ini berada paling ujung bagian barat kecamatan berbatasan langsung dengan kabupaten sijunjung, Provinsi Sumatra Barat. Daerah cukup jauh dari pusat pemerintahan. Dari bangkinang kota sebagai pusat pemerintahan Kampar, akan memakan waktu sekitar 7 jam, dari pekanbaru, lebih kurang sama. Saat sampai desa Gema mobil atau sepeda motor tak bisa

lewat lagi, sebab untuk mencapai desa pangkalan serai harus menggunakan perahu tak ada jalan darat kesana harus mengarungi sungai subayang.

Ada dua jenis perahu mesin yang digunakan warga perahu kecil yang dinamakan dengan Robin dan perahu ukuran besar dinamakan dengan Jonson, kalau ke Desa Pangkalan Serai ongkosnya 50 ribu per orang. Untuk mencapai Desa Pangkalan Serai ada beberapa desa yang harus dilalui mulai dari Desa Muaro Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gaja Bertelut, Aur Kuning, Terusan, Subayang Jaya dan yang paling ujung yaitu desa Pangkalan Serai perjalanan dengan perahu akan memakan waktu empat jam perjalanan, Desa pangkalan serai memiliki luas pemukiman 4800 (ha) hakter.

Didalam menjalankan pemerintahan dalam menyusun BPD dan kepala desa merupakan rekan kerja dimana badan permusyawaratan desa (BPD) bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemeritahan desa sedangkan kepala desa sebagai orang penggerak utama dalam desa tersebut. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam pengelolaan keseluruhan dana desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini kepala desa dalam melakukan pengelolaan seluruh dana dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Berikut ini adalah tabel jumlah Aparatur Desa Pangkalan Serai yaitu :

**Tabel I.1 :Jumlah Aparatur Desa di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala desa	1	Aktif
2	Sekretaris desa	1	Aktif
3	Kepala Urusan	2	Aktif

1	2	3	4
4	Kepala Seksi	2	Aktif
5	Ketua BPD	1	Aktif
6	Anggota BPD	6	Aktif
7	Kepala Dusun	4	Aktif
8	RW	8	Aktif
9	RT	16	Aktif

Sumber : Kantor Desa Pangkalan Serai

Berdasarkan tabel diatas terlihat ada 1 orang kepala desa yaitu sebagai pimpinan tertinggi di unit organisasi pemerintahan, dan selanjutnya ada sekretaris desa 1 orang, kepala urusan 2 orang, kepala seksi ada 2 orang, ketua BPD 1, anggota BPD ada 6 orang, kepala dusun 4 orang, RW ada 8 dan RT ada 16 orang. Adapun perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pangkalan Serai tahun anggaran 2019 dengan rincian pada tabel berikut ini :

**Tabel I.2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Jumlah Keseluruhan APBDes	Tahun 2019
1	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 2.461.105.000</b>
	- Alokasi dana desa	Rp. 680.631.000
	- Bantuan keuangan kabupaten	Rp. 754.231.200
2	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 2.461.105.000</b>
	<b>Belanja Langsung</b>	-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 31.950.000
	- Belanja pegawai	Rp. 527.663.261
	- Tujuan BPD/operasional kepala desa	Rp. 1.388.985
	- Operasional BPD	Rp. 294.863.261
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
	- Belanja hibah	-
	- Belanja bantuan sosial	-
	- Belanja bantuan keuangan	-
	- Bantuan pelaksanaan pemilihan	-
	- kepala desa	-
	- Belanja tak terduga	-
	- Keadaan darurat	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai

Berdasarkan dari data tabel 1.2 terlihat bahwa keseluruhan dan anggaran dana desa tahun 2019 yaitu Rp. 2.461.105.000 keseluruhan anggaran yang diperoleh desa yang terakumulasi dari beberapa sumber diantaranya alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten. Adapun belanja desa langsung seperti barang dan jasa, belanja pegawai, tujuan PBD/ operasional kepala desa, operasional BPD.

**Tabel I.3: Belanja Desa Tahun 2019 Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Pembiayaan	Semula	Berkurang / Bertambah	Jumlah Setelah Perubahan
1	Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp.603.088.500	-	Rp.603.088.500
2	Bidang pelaksanaan Program pembangunan desa	Rp.1.388.985.500	-	Rp.1.388.985.500
3	Bidang pembangunan kemasyarakatan	Rp.131.682.000	-	Rp.131.682.000
4	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	Rp.337.349.000	-	Rp.337.349.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.2.461.105.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp.2.461.105.000</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai

Berdasarkan data tabel 1.3 terlihat bahwa keseluruhan anggaran yang di peroleh desa berjumlah Rp.2.461.105.000, yang digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembangunan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan dengan cara RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD, Penyaluran dana desa di RKUN ke RKUD telah dilakukan setelah kepala KPPN menerima.

1. Peraturan daerah tentang APBD kabupaten / kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati / walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap desa
3. Laporan realisasi penyaluran dana desa anggaran sebelumnya
4. Laporan cart center realisasi penyepan dan capaian keluaran dana desa sebelumnya anggaran .

Penyaluran dana desa untuk II dilakukan setelah ketua KPPN menerima

1. Laporan realisasi penyaluran dana desa dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling tidak sebesar 90% dari dana desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
2. Hasil evaluasi realisasi penarikan dan capaian dana desa dari Bupati / Walikota, penilaian atas rata-rata pelaksanaan paling rendah 75% dan keluaran rata-rata capaian paling rendah 50%. Output capaian paling tidak sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa, Dana

Desa dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dengan adanya Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa, maka pertanggungjawaban juga sama dengan lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dalam hal ini APBN, dengan demikian pengawasan dalam rangka menegendalikan distribusi dan alokasi dana desa sangat perlu diperhatikan, pengawasan dilakukan dalam rangka menegendalikan kesalahan ataupun penyalagunaan dari anggaran dana desa yang diberikan, sehingga diupayakan dengan adanya pengawasan pengelolaan dan alokasi dana desa, pendistribusian dari dana berajalan dengan baik sesuai dengan tujuan negara. Dan yang berperan didalam pengawasan ini adalah lembaga pemerintah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan dana desa (PMD) tingkat kabupaten.

Keuangan desa tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan adalah sebagai berikut : “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah sebagai berikut: “Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Dalam bagian ini merupakan sebuah ketentuan yang menyangkut tentang penganggaran dan sumber anggaran desa, yang mana merupakan hasil dari keseluruhan dari potensi sekaligus sumberdaya yang dimiliki dari beberapa sumber anggaran, antara lain anggaran Dana Desa juga sampai pada sumber dari dana desa lainnya, sehingga dapat disimpulkan keuangan desa merupakan keseluruhan dari segala sumber dan segala bentuk keuangan yang dimiliki oleh Desa. Sehingga dalam pembahasan ini yang menjadi acuan peneliti adalah bagaimana melakukan pengelolaan Keuangan Desa didalam pelaksanaan Pembangunan Program Desa.

Didalam sistem pengelolaan, kepala desa menunjukan pada perangkat desa untuk mengelolah dana yang ada selanjutnya digunakan mendanaia akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya alokasi dana desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus mampu mengelolah dana yang dimana telah diberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana.

Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi

suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa harus dilakukan sesuai dengan rencana Kerja pemerintah Desa Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa terdapat 3 bidang, salah satunya adalah Bidang Pembangunan Program Desa yang telah terselesaikan dan tidak terselesaikan ditahun 2019 yaitu dalam tabel berikut ini :

**Tabel I.4 : Program Pembangunan Desa Pangkalan Serai Yang Sudah Terlaksana dan Belum Terlaksana**

No	Program Pembangunan	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana	Keterangan
1	Turap Penahan Tebing 1	RW 01	Dana Desa	Rp.57.041.300	Terlaksana
2	Turap penahanan Tebing 2	RW 02	Dana Desa	Rp.57.041.300	Terlaksana
3	Tangga Dermaga	RW 03	Dana Desa	Rp.36.183.220	Terlaksana
4	MCK	RW 04	Dana Desa	Rp.40.000.000	Terlaksana
5	Semenisasi	RW 02	Dana Desa	Rp.73.903.440	Belum terlaksana
6	Semenisasi	RW 03	Dana Desa	Rp.86.093.030	Belum terlaksana
7	Semenisasi	RW 01	Dana Desa	Rp.104.891.000	Belum terlaksana
8	Pembangunan Tower	Desa Pangkalan Serai	Provinsi	Rp.84.409.000	Belum terlaksana
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 540.826.090</b>	

*Sember: Data Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai.*

Berdasarkan data Tabel 1.4 diatas terlihat bahwa sahnya program pembangunan Desa pada tahun 2019 desa Pangkalan Serai, hanya ada 4 program pembangunan di Desa pangkalan serai, turap penahanan tebing 1 di RW 01, turap penahanan tebing 2 di RW 02, tangga dermaga di RW 03, dan MCK di RW 04.

Adapun terdapat 4 program dana desa yang tidak terlaksana yaitu semenisasi RW 01 sampai RW 03 dan pembangunan tower, karena adanya perubahan anggaran sekaligus beberapa rasionalisme anggaran untuk pembangunan sehingga pada program semenisasinya tidak bisa terlaksanakan, ditambah pula karena adanya keterlambatan dari proses pencairan dana desa .

Dengan hal ini penulis menunjukkan ternyata masih banyak dari beberapa pembangunan yang dilaksanakan belum dapat dilakukan secara optimal.

Setelah penulis melakukan pra survey dilapangan, adapun beberapa fenomena permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan di desa Pangkalan Serai.
2. Masih lemahnya informasi karena jaringan tidak masuk ke desa Pangkalan Serai.
3. Masih lemahnya pengawasan unit pelaksanaan program yaitu badan pengawasan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ?**

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Kegunaan teoritis untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang ingin meneliti judul yang sama dengan daerah yang berbeda.
- c. Kegunaan praktis untuk meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengarahkan dan menyediakan data dan fakta secara sistematis.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan menindak pada teori yang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administrate* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*).

Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis dan surat menyurat. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, definisi tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi.

Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Sondang P Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Zulkifli ( 2009 : 9 ) konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.

Menurut Gie ( dalam bukunya Zulkifli dan Moris, 2014 ; 14) administrasi merupakan segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perpektif proses. Adapun unsur - unsur tersebut meliputi

- Organisasi ( tata keragaman)
- Manajemen ( tata pimpinan )
- Komunikasi (tata hubungan )
- Informasi ( keterangan )
- Personalia ( tata kepegawaian )
- Finansia (tata keuangan )
- Material ( tata pembekalan )
- Relasi publik (tata human ).

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafie ( 2003:31 ) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan - badan perwakilan politik.
- b. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha - usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Hal ini meliputi pekerjaan sehari - hari pemerintah. Yang bersangkutan dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya dan teknik - teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap jumlah orang.

Menurut Chander dan Plano dalam Keban ( 2004 : 3 ) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( *manage* ) keputusan - keputusan dalam publik.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi secara etimologi berasal dari kata organon atau dalam bahasa Yunani yang alat. Desain organisasi ( *organizational design* ) merupakan proses memilih dan mengimplementasikan struktur yang terbaik untuk mengelola sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Untuk memenuhi segala kebutuhan manusia segala kebutuhan manusia harus hidup berkelompok oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang berguna untuk mempermudah mencapai tujuan, maka dari itu manusia membutuhkan organisasi, memahami konsep administrasi publik secara utuh,

perlu memahami definisi dan teori “ organisasi”, banyak ahli yang telah mendefinisikan organisasi, berikut merupakan definisi menurut para ahli:

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, Organisasi adalah susunan serta ketuntan dari berbagai macam sisi ( orang atau grup) hingga menjadi satu kesatuan yang teratur.

Menurut Kenneth Wexley dan Yuki ( 2005; 35 ) organisasi dalam pandangan beberapa pakar seolah-olah menjadi suatu “ binatang” yang berwujud banyak, namun tetap memiliki kesamaan konseptual. Atau dengan kata lain, rumusan mengenai organisasi sangat tergantung kepada konteks dan perspektif tertentu dari seorang yang merumuskan tersebut.

Yang dikatakan Siagian (dalam Zulkifli, 2009:78) mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahannya.

### **3. Konsep Manajemen**

Manajemen berasal dari bahasa parancis yang kemudian mengadopsi kata ini dari bahasa inggris menjadi management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen merupakan rangkaian atau proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai hasil dan tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti tenaga kerja, biaya, bahan - bahan, peralatan, cara-cara kerja, pemasaran atau pelayanan dengan efisien dan efektif.

Untuk memahami secara lebih jelas mengenai pengertian manajemen, Maka peneliti akan menguraikan, tergambar pada rumusan manajemen yang dikemukakan oleh Geoge R Terry (dalam buku Zulkifli, 2009 : 18) mendefinisikan konsep manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan - tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing - masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sondang P Siagian dan Hendry Andry ( 2015 : 12 ) manajemen merupakan ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuasn tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur 6m yaitu : *Man, money, methode, material, machine, dan market*.

#### **4. Konsep Pengelolaan**

Adisasmita (2011 : 22) mengemukakan bahwa “ pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaiann kegiatan yang meliputi fungsi – fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam kamus bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:32) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Marry Parker Follet (2007:78) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat 3 faktor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor – faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

## 5. Konsep Desa

Desa memiliki kekuatan Hukum dalam menjalankan pemerintahnya dibawah kepala desa serta perangkat desa lain yang juga diwakili oleh BPD atau badan permusyawaratan desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan kepala desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana seseorang menyikapi hal tersebut sebagai masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **6. Konsep Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa atau (ADD ) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal I Ayat 11 ).

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada desa, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari retribusi profesional untuk setiap desa ( Warsno, 2014)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (RPJMD, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemikiran kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah kepala desa. Kepala desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan petugas pemungutan penerima desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (kasi), dan bendahara. Tugas dan sekretaris desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdes.

Menyusun RAPBdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBdes, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBdes, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBdes, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti – bukti pengeluaran (Permendagri Nomor 20 tahun 2018).

Sedangkan bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menytorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

## **7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan

desa sebagai “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah sebagai berikut, “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan beberapa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

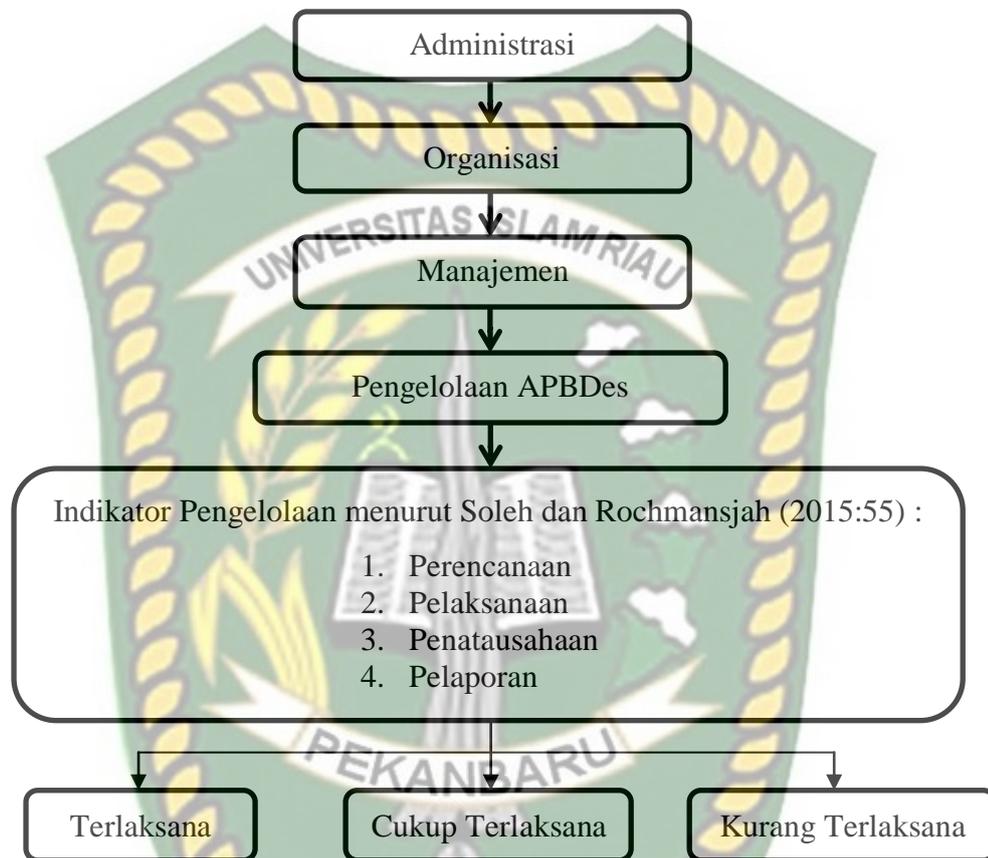
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah sebagai berikut: “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:55), Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

## **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, kemudian diukur dengan teori yang dijadikan fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan dan unsur-unsur dalam penelitian ini kedalam gambaran alur penelitian pada gambar berikut :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**



*Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2021.*

### C. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak sesuatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan

mengoprasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitaskan proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah seni untuk memengaruhi orang lain agar mau melakukan suatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
4. Pengelolaan adalah pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi – fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
6. Pengelolaan dana desa adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.
7. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

8. Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa akan datang.
9. Pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan.
10. Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.
11. Pelaporan adalah kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik baik semesteran dan tahunan.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel penelitian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.I : Operasional Variabel Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Adisasmita (2011:22).	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	1. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Raperdes tentang APBDes yang dilakukan oleh sekretaris berdasarkan RKP desa.</li> <li>Perencanaan APBDes dan RKP desa dilakukan sesuai dengan peraturan bupati.</li> <li>Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		2. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan keuangan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.</li> <li>Transaksi pada rekening desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan ditanda tangani oleh kepala desa dan kaur keuangan.</li> <li>Melengkapi bukti pendukung transaksi yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		3. Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai fungsi kebhendaharaan.</li> <li>Melakukan pencatatan seluruh transaksi dan disiplin administrasi.</li> <li>Pencatatan dilakukan satu tahun anggaran dan melakukan tutup buku setiap akhir tahun.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		4. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala desa melakukan pelaporan pada semester pertama kepada Bupati.</li> <li>Menginformasikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis.</li> <li>Laporan yang dibuat merupakan gabungan dari seluruh laporan kegiatan sesuai dengan RKP desa.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

## E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase dengan alat bantu tabel frekuensi, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

### ▪ Ukuran Variabel

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 0 - 33%

### • Ukuran Indikator Variabel

#### 1. Perencanaan

Terlaksana : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 0 - 33%

## 2. Pelaksanaan

Terlaksana : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 0 - 33%

## 3. Penatausahaan

Terlaksana : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 0 - 33%

## 4. Pelaporan

Terlaksana : Apabila penilaian pelaporan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian pelaporan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian pelaporan terhadap Pengelolaan APBDes berada pada skala 0 - 33%

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan analisa kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar karena. Penelitian ini dimaksud memberikan hasil anilisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian analisa deskriptif adalah untuk membuat deskriptip, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.ian lebih berkenaan dengan interpesstasibterhadap yang ditemukan dilapangan. Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasr untuk menganalisis dan menjelaskan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih Desa Pangkalan Serai sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan pengelolaan APBDes Pangkalan Serai bersifat kurang transparan. Selain itu masih kurangnya pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan di desa Pangkalan Serai. Kemudian masih lemahnya informasi karena jaringan tidak masuk ke desa Pangkalan Serai.

Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musrenbang Desa adalah forum rembuk warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi Menurut Sugiono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, sampel Menurut Sugiono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena tidak

representative, maka ibarat orang bisu disuruh menyanyikan sebuah lagu. Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Subjek	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala desa	1	1	100 %
2	Sekretaris desa	1	1	100 %
3	Kaur desa	2	2	100 %
4	Kasi desa	2	2	100 %
5	BPD	7	7	100 %
6	LPMD	5	5	100 %
7	Tokoh Masyarakat	2	2	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Desa Pangkalan Serai, 2021.

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana menurut Arikunto (2006:38) *purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Menurut Notoatmodjo (2010) pengertiannya adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas sesuatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah ditentukan sebelumnya.

Teknik penarikan *purposive sampling* ini diajukan untuk beberapa perangkat desa yang bekerja di kantor desa Pangkalan Serai. Selanjutnya, untuk kepala desa Pangkalan Serai, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan – keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atas diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian ini yakni pegawai kantor desa Pangkalan Serai dan masyarakat sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data dan sumber informasi dan keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu pemerintahan desa pangkalan serai. Data sekunder ini diperoleh dari kantor kepala desa Pangkalan Serai, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh perangkat desa seperti struktur organisasi desa Pangkalan Serai, RPJM, maupun informasi yang ditempel di kantor kepala desa Pangkalan Serai.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik dilakukan agar informasi yang didapat oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika ditetapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Angket / kuisioner

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh reponden.

4. Dokumentasi

Dokumkentasi merupsakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman.

### G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisa secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan

Mendesripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menentukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minang Kampar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Perkembangan Kabupaten Kampar Pada tanggal 9 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi kebakaran hutan dan lahan, di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
2. Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Barat Kabupaten Lima puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
4. Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm$  413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm$  90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

#### **B. Demografi Kabupaten Kampar**

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minang kabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian wilayah 39elati dengan Persuku Domo, Melayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minang kabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limo

puluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan 40elative40al militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sejenis etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatas dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang terbesar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di 40elati-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu 226 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km<sup>2</sup>, 191 jiwa/km<sup>2</sup>, 158 jiwa/km<sup>2</sup>, 154 dan 131 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan dua kecamatan yang 40elative jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km<sup>2</sup>.

### C. Gambaran Agama Kabupaten Kampar

Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total pemeluk agama di seluruh wilayah Kabupaten Kampar, selanjutnya pemeluk agama Kristen yang terbanyak kedua sebanyak 63.557 orang atau 8,6%. Pemeluk agama Islam yang terbanyak berada di Kecamatan Siak Hulu yaitu sebanyak 63.511 orang. Meski pada umumnya semua Kecamatan di Kabupaten Kampar adalah mayoritas beragama Islam. Masjid Jami Air Tiris, termasuk salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar.

### D. Gambaran Peristiwa Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan tradisi mandi balimau bakasai yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga tradisi Ma'awuo ikan yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu).

Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minang kabau, yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian

dari Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limo puluah. Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minang kabau, atau disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksent dengan varian Bahasa Minang kabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar maupun kawasan pesisir Minang kabau lainnya. Di samping itu, Kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan Calempong dan Oguong.

### **I. Sejarah Desa Pangkalan Serai**

Desa Pangkalan Serai berdiri pada bulan November 1977 tepatnya setelah berlangsungnya pemilu. Adapun Desa Pangkalan Serai merupakan Desa Pemekaran dari Kenegerian Airtiris. Pada awalnya Desa ini dipimpin oleh Wali Muda diubah menjadi wali Desa dan dipimpin oleh Umar Ja'far. Kemudian pada tahun 1988 s/d 1990 dipimpin oleh Kepala Desa Muda yang bernama Muslim A.

Pada tahun 1990 diadakan pemilihan secara Demokrasi yang diikuti tiga calon yaitu 1. Muslim A, 2. Ali Amran dan Hasna Hara dan dimenangkan oleh Muslim A dengan masa jabatan 1990 s/d 1998 setelah masa jabatan habis diangkatlah Pjs yang diangkat oleh Hasan Basri (Kadus Naga Beralih) pada tahun 2000 dilakukan pemilihan kades yang diikuti oleh 2 pasang calon yaitu Khairullah, SH dan Hasan Basri dimenangkan oleh Khairullah, dengan masa

jabatan 2000 s/d 2006 tetapi Kepala Desa Khairullah hanya menjalani hingga akhir tahun 2003 karena beliau mengikuti Proses Pemilihan Legislatif, yang kemudian masa jabatan dilanjutkan oleh Pjs Zulpaman sampai tahun 2008.

Pada tahun 2005 mekarlah Dusun Kapur dan Dusun Teratak Padang menjadi satu Desa dengan nama baru dengan nama Desa Persiapan yakni Desa Sendayan. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan kembali pemekaran salah satu Dusun Naga Beralih menjadi Desa Persiapan Naga Beralih. Kemudian pada bulan Mei 2008 dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa untuk yang ketiga kalinya diikuti oleh empat calon yaitu: 1. Abdul Muthalib 2. Anasril, SE 3. Hendri 4. H. Darius yang dimenangkan oleh H. Darius dengan masa jabatan juni 2008 s/d juli 2014. Sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan H. Darius maka diangkatlah Penjabat Kepala Desa Pangkalan Serai yaitu Anasril, SE sampai bulan juli 2015. Selanjutnya Pj Kades dijabat oleh Drs, Iskandar M.si (Camat Kampar Utara). Dan bulan oktober 2015 Pj. Kades Pangkalan Serai dijabat Dalimi, S.Ag (Kasi Trantib Kec. Kampar Utara). Kemudian diadakan Pilkades serentak di Kabupaten sebanyak 105 Desa dan untuk Pangkalan Serai diikuti oleh lima Calon Kepala Desa : 1. Ridha Zikra 2. Anasril, SE 3. Mhd. Khairil Akbar 4. M. Akbar 5. Jasril dan yang terpilih menjadi Kades adalah Sdr. Anasril, SE sampai sekarang.

### **I. Profil Desa Pangkalan Serai**

Desa Pangkalan Serai merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar di Provinsi Riau dengan Luas wilayah 82,25 Ha. Jarak desa dengan Provinsi sepanjang 78 Km dengan jarak tempuh 120 menit, jarak desa dengan kabupaten sepanjang 30 Km dengan jarak tempuh selama 50

menit dan jarak dengan kecamatan sepanjang 16 Km dengan jarak tempuh selama 15 menit.

Batas-batas wilayah Desa Pangkalan Serai terletak antara

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Naga Beralih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendayan

#### **G. Keadaan Penduduk Desa Pangkalan Serai**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, adapun jumlah penduduk Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah Desa Pangkalan Serai berpendudukan 991 jiwa dengan 164 Kepala Keluarga yang terdiri dari 432 jiwa Laki-laki dan 459 jiwa Perempuan.

#### **H. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Pangkalan Serai**

Keadaan Sosial dan Ekonomi penduduk Desa Pangkalan Serai berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

##### **I. Mata Pencaharian**

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut pekerjaan/mata pencaharian dapat dipisahkan menurut dua belas jenisnya masing-masing sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel IV.1 : Keadaan Penduduk Desa Pangkalan Serai Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	129
2.	Pedagang	21
3.	PNS	8
4.	Tukang	3
5.	Guru	20
6.	BUMN/BUMD	2
7.	TNI/Polri	-
8.	Pensiunan	14
9.	Sopir/Angkutan	-
10.	Buruh	7
11.	Swasta	257
12.	Honoror	32
<b>Jumlah</b>		<b>493</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai, 2021.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Desa Pangkalan Serai adalah Swasta dan yang kedua Petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tergolong cukup sejahtera.

## 2. Tingkat Pendidikan

Dari pemerataan pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, masyarakat desa Pangkalan Serai memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap system pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkalan Serai yang dituangkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pangkalan Serai**

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Masyarakat
1	SD/MI	101
2	SLTP/MTs	183
3	SLTA/MA	275
4	S1/Diploma	26
5	Putus Sekolah	6
6	Buta Huruf	14
<b>Jumlah</b>		<b>605</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai, 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pangkalan Serai mayoritas tingkat pendidikan SLTA/MA yaitu sebanyak 275 orang dan minoritas tingkat pendidikan S1/Diploma berjumlah 26 orang.

### 3. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan tersebut selayaknya data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah sangatlah mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu dibawah ini jenis sarana pendidikan di Desa Pangkalan Serai sebagai berikut :

**Tabel IV.3 : Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pangkalan Serai**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/Paud	1
2	SD	1
3	SMP	-
4	SMA	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai, 2021.

Apabila dilihat dari data sarana dan prasarana pendidikan diatas, maka untuk sarana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah bisa dikatakan

belum memadai, karena hanya ada sekolah TK dan SD saja, sedangkan gedung SLTP dan SLTA belum ada. Kemudian untuk sarana tempat ibadah di Desa Pangkalan Serai terdapat satu buah masjid dan empat surau. Dan untuk sarana kelistrikan, saat ini di Desa Pangkalan Serai belum masuk PLN, namun masih menggunakan tenaga PLTD dengan beroperasi selama 12 jam.

### I. Pemerintahan Desa Pangkalan Serai

Unsur pemerintahan Desa Pangkalan Serai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari aparat Pemerintahan Desa dan BPD.

Kepala Desa Pangkalan Serai dipilih oleh masyarakat Desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh aparat desa dari unsur sekretaris desa, Perangkat desa dan BPD.

**Tabel IV.4 : Pejabat Struktural Pemerintah Desa Pangkalan Serai**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kaur (Kepala Urusan)	2 orang
4	Kasi (Kepala Seksi)	2 orang
5	Kadus (Kepala Dusun)	2 orang
6	BPD	7 orang
7	LPMD	5 orang
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>

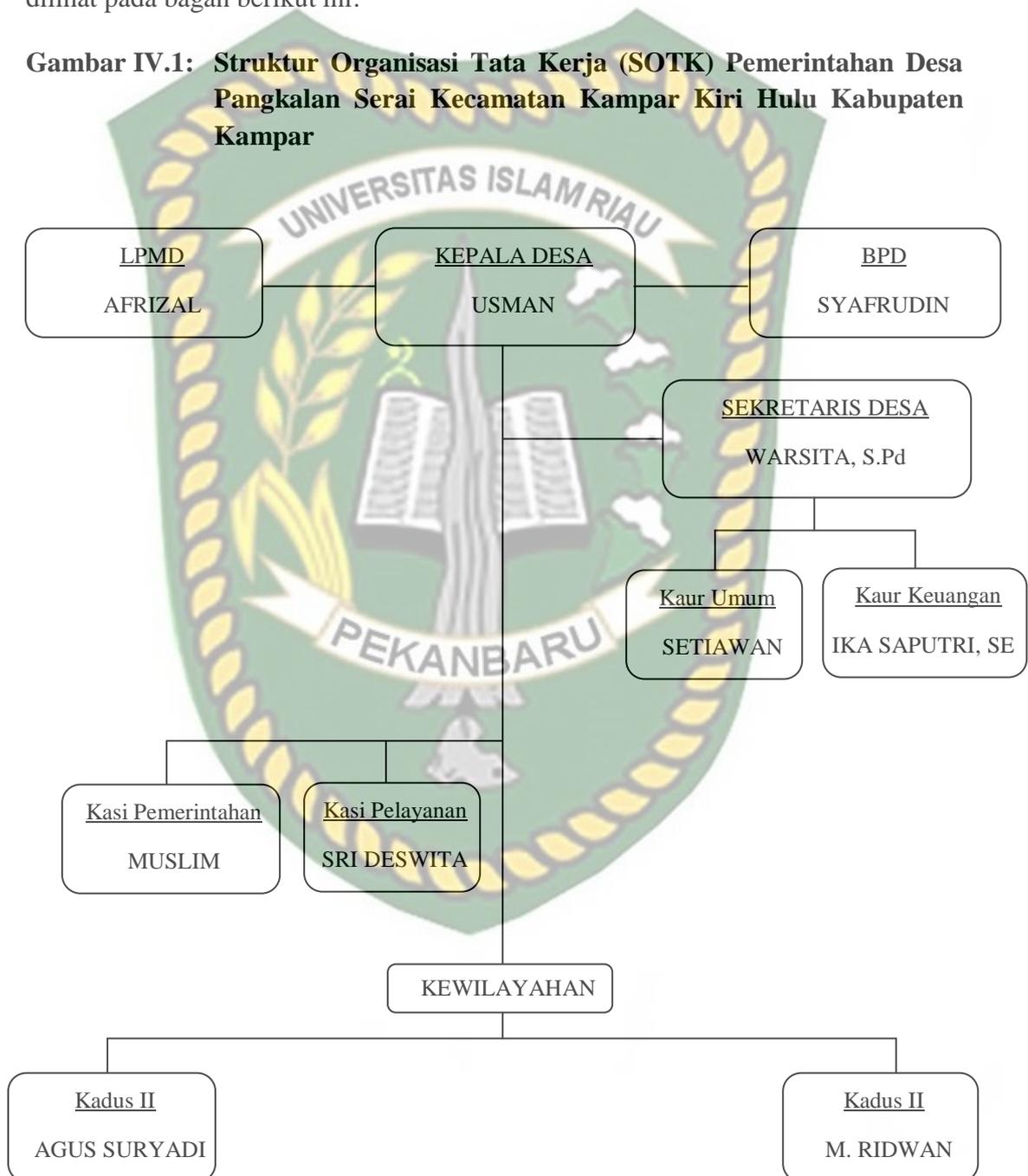
Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pejabat Struktural Pemerintah Desa Pangkalan Serai berjumlah 20 orang, jumlah yang paling banyak adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yaitu berjumlah 7 orang.

## J. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pangkalan Serai

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pangkalan Serai dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar IV.1: Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**



Sumber: Kantor Kepala Desa Pangkalan Serai, 2022.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kaur, 2 orang Kasi, 7 orang BPD, 5 orang LPMD, dan 2 orang tokoh masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur responden.

##### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Desa Pangkalan Serai terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada di Desa Pangkalan Serai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	16	80%
2	Perempuan	4	20%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari 16 orang jenis kelamin laki-laki (80%) dan 4 orang jenis kelamin perempuan (20%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 80%.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTP	3	15%
2	SLTA	15	75%
3	Sarjana	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari tingkat pendidikan SLTP 3 orang (15%), SLTA berjumlah 15 orang (75%), dan Sarjana berjumlah 2

orang (10%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SLTA yaitu dengan persentase 75%.

### 3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	5	25%
2	31 – 40	7	35%
3	41 – 50	8	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang berada pada usia 20-30 berjumlah 5 orang (25%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 7 orang (35%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 8 orang (40%). Jadi, dapat diketahui bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya

lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 40%.

## **B. Hasil Penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan, yang mana bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa Pangkalan Serai untuk kurun waktu tertentu dimasa akan datang. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Menyusun Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes, Perencanaan APBDes dan RKP desa dilakukan sesuai dengan peraturan bupati, dan Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Perencanaan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perencanaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menyusun Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	20
2	Perencanaan APBDes dan RKP desa dilakukan sesuai dengan peraturan bupati	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
3	Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	20
Jumlah		36	24	0	60
Rata-rata		12	8	0	20
Persentase		60%	40%	0%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Perencanaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 60%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam indikator Perencanaan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada

tanggapan responden terhadap pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa Rencana Peraturan Desa yang di susun setiap tahunnya di Desa Pangkalan Serai, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Kepala Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar mengenai indikator Perencanaan, Beliau menjawab :

*“Kalau untuk Raperdes yang kita susun setiap tahunnya prosesnya terlebih dahulu kita mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan adakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Ranperdes untuk tiap tahunnya. Seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan setelah itu baru dituangkan dalam Raperdes RKPDes, dan disampaikan kepada kepala desa”.* (Wawancara : Senin, 23 Agustus 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Perencanaan, peneliti melihat bahwa Raperdes (Rencana Peraturan Desa) yang di

susun setiap tahunnya di Desa Pangkalan Serai, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya. Perencanaan APBDes dan RKP desa harus disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar. Kemudian setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan. Setelah itu baru dituangkan dalam Ranperdes RKPDes, dan di sampaikan kepada Kepala Desa Pangkalan Serai.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Perencanaan dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 12 (60%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dana desa Pangkalan Serai dan kegiatan dilapangan. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran

melalui rekening kas desa, Transaksi pada rekening desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan ditanda tangani oleh kepala desa dan kaur keuangan, dan Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengelolaan keuangan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
2	Transaksi pada rekening desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan ditanda tangani oleh kepala desa dan kaur keuangan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
3	Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
Jumlah		36	24	0	60
Rata-rata		12	8	0	20
Persentase		60%	40%	0%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pelaksanaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 60%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam indikator Pelaksanaan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa Pangkalan Serai selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, Desa Pangkalan Serai mengajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar bisa Pemerintah Desa Pangkalan Serai melakukan pencairan dana.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Kepala Desa Pangkalan Serai mengenai indikator Pelaksanaan, Beliau menjawab :

*“Untuk saat ini kita selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya kita mengajukan ke kecamatan melalui permohonan kita sendiri yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, kita ajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan*

*rekomendasi untuk kita melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti seperti yang disebutkan tadi, kami kira setiap kali kita melakukan pencairan ataupun melaksanakan kegiatan, bukti pendukungnya selalu kita lampirkan. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur dan kwitansi kegiatan yang kita belanjakan tidak lengkap maka kita tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan". (Wawancara : Senin, 23 Agustus 2021).*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pelaksanaan, peneliti melihat bahwa pemerintah desa Pangkalan Serai selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, Desa Pangkalan Serai mengajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar Desa Pangkalan Serai bisa melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti-bukti transaksi, pendukungnya selalu dilampirkan saat bertransaksi. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur dan kwitansi kegiatan yang di belanjakan tidak lengkap, maka desa Pangkalan Serai tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Pelaksanaan dalam penelitian Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 12 (60%). Sesuai dengan penjelasan di awal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa Pangkalan Serai dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai fungsi kebendaharaan, Melakukan pencatatan seluruh transaksi dan disiplin administrasi, dan Pencatatan dilakukan satu tahun anggaran dan melakukan tutup buku setiap akhir tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Penatausahaan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai fungsi kebhendaharaan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
2	Melakukan pencatatan seluruh transaksi dan disiplin administrasi	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
3	Pencatatan dilakukan satu tahun anggaran dan melakukan tutup buku setiap akhir tahun	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
Jumlah		36	24	0	60
Rata-rata		12	8	0	20
Persentase		60%	40%	0%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Penatausahaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 60%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam indikator Penatausahaan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Pangkalan Serai memang seharusnya melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Pangkalan Serai melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Kepala Desa Pangkalan Serai mengenai indikator Penatausahaan, Beliau menjawab :

*“Pemerintah Desa Pangkalan Serai sudah Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan Terlaksana. Kemudian kalau untuk tutup buku yang kita lakukan untuk desa Pangkalan Serai memang seharusnya kita melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi kita melakukan tutup bukunya per 31 desember. Kemudian kalau untuk hambatannya kita kira sama-sama paham dimana kalau untuk hambatan ini banyak macamnya, di segi bentuk pun ada juga, di segi karakter ada juga, apalagi karakter di tempat kita ini pola pikirnya masih jauh dari maju, jadi untuk mempermudah itu atau untuk menyelesaikan itu memang sangat butuh kerjasama yang sangat Terlaksana. Kemudian yang paling mendasar kami kira untuk hambatan ini adalah masalah bebas lahan, soalnya setiap pembangunan yang kita laksanakan mungkin sudah terealisasikan di Musdes, namun tiba-tiba bebas lahannya bermasalah”.* (Wawancara : Senin, 23 Agustus 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Penatausahaan, peneliti melihat bahwa semua sumber pendapatan desa Pangkalan Serai sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, Dana Desa (DD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya seperti dana dari Provinsi, semua sudah di masukkan dan di total kedalam sebuah pendapatan yang

dinamakan dengan Pendapatan Desa. Semua yang sudah di jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real atau nyata oleh desa yang dituangkan dalam APBDes tersebut. Pemerintah Desa Pangkalan Serai sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan Terlaksana. Akan tetapi, Pemerintah desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Pangkalan Serai memang seharusnya melakukan tutup buku di tiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Pangkalan Serai melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Penatausahaan dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 12 (60%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan adalah kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik baik semesteran dan tahunan. Pelaporan keuangan desa adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah desa Pangkalan Serai. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Kepala desa melakukan pelaporan pada semester

pertama kepada Bupati, Menginformasikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis, dan Laporan yang dibuat merupakan gabungan dari seluruh laporan kegiatan sesuai dengan RKP desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Pelaporan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaporan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kepala desa melakukan pelaporan pada semester pertama kepada Bupati	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
2	Menginformasikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
3	Laporan yang dibuat merupakan gabungan dari seluruh laporan kegiatan sesuai dengan RKP desa	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
Jumlah		36	24	0	60
Rata-rata		12	8	0	20
Persentase		60%	40%	0%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pelaporan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan

jumlah persentase 60%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam indikator Pelaporan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa dalam melaporkan realisasi APBDes, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke DPMPD Kabupaten Kampar.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Kepala Desa Pangkalan Serai mengenai indikator Pelaporan, Beliau menjawab :

*“Kalau untuk laporan realisasi, kepala desa tetap melaporkan realisasi baik dia tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan kita laporkan ke DPMPD Kabupaten Kampar. Kemudian kalau untuk saat ini mungkin lantaran pola pikir masyarakat pun agak istilahnya kurang, jadi kalau untuk laporan realisasi, penginformasiannya kita hanya menyampaikan lewat papan mading aja. Saya kira semua bisa lihat di depan kantor desa Pangkalan Serai ini ada papan informasi, kita selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang kita laksanakan per tahunnya. Kalau untuk saran dan harapan kita yang jelas kita memang mengharapkan terbangunnya desa kita dengan Terlaksana dan maju. Dan oleh sebab itu kita juga mengharapkan dari pihak pemerintah pusat seperti provinsi dan kabupaten, bahwa dalam menyusun aplikasi APBDes ini untuk dapat dipermudah ataupun bisa gampang dimengerti, bukan*

*untuk mempersulit, jadi untuk mempermudah kita juga bersama-sama”.*  
(Wawancara : Senin, 23 Agustus 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pelaporan, peneliti melihat bahwa dalam melaporkan realisasi APBDes, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kampar. Kemudian untuk laporan realisasi dana desa kepada masyarakat desa Pangkalan Serai, penginformasiannya hanya disampaikan lewat papan mading saja. Semuanya bisa melihat di depan kantor desa Pangkalan Serai bahwa ada papan informasi, pemerintah desa selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang dilaksanakan per tahunnya oleh pemerintah desa Pangkalan Serai.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Pelaporan dalam penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 12 (60%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perencanaan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
2	Pelaksanaan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
3	Penatausahaan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
4	Pelaporan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20
Jumlah		48	32	0	80
Rata-rata		12	8	0	20
Persentase		60%	40%	0%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar diatas, untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 60% (12 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 40% (8 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Terlaksana adalah sebesar 0% (0 responden), dari total keseluruhan responden sebanyak 20 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dikategorikan Cukup

Terlaksana dengan total persentase sebesar 60% (12 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, secara keseluruhan sudah Cukup Terlaksana. Pada indikator Perencanaan, Raperdes (Rencana Peraturan Desa) yang di susun setiap tahunnya di Desa Pangkalan Serai, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya didapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya. Kemudian setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan. Setelah itu baru dituangkan dalam Ranperdes RKPDes, dan di sampaikan kepada Kepala Desa Pangkalan Serai.

Kemudian pada indikator Pelaksanaan, pemerintah desa Pangkalan Serai selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKKU dan permohonan tersebut, Desa Pangkalan Serai mengajukan ke kecamatan, dan

oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar Desa Pangkalan Serai bisa melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti-bukti transaksi, pendukungnya selalu dilampirkan saat bertransaksi. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur dan kwitansi kegiatan yang di belanjakan tidak lengkap, maka desa Pangkalan Serai tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan.

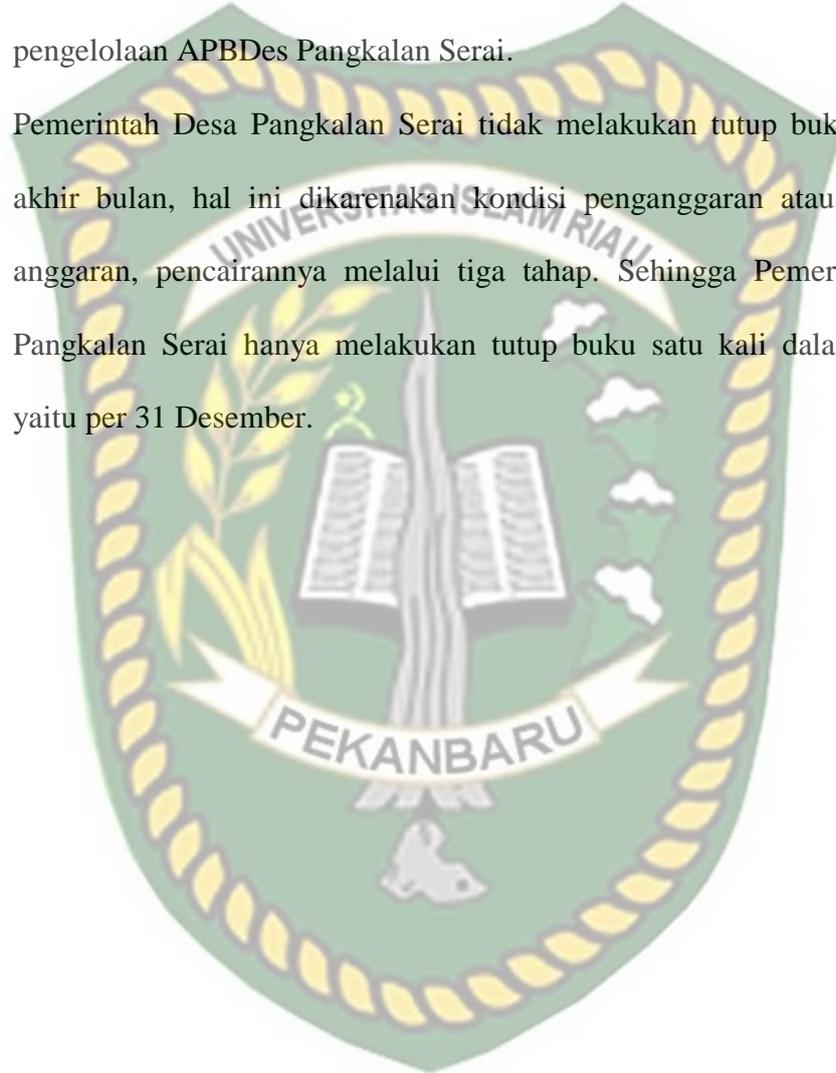
Selanjutnya pada indikator Penatausahaan, semua sumber pendapatan desa Pangkalan Serai sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, Dana Desa (DD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya seperti dana dari Provinsi, semua sudah di masukkan dan di total kedalam sebuah pendapatan yang dinamakan dengan Pendapatan Desa. Semua yang sudah di jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real atau nyata oleh desa yang dituangkan dalam APBDes tersebut. Pemerintah Desa Pangkalan Serai sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan Terlaksana. Akan tetapi, Pemerintah desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Pangkalan Serai memang seharusnya melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Pangkalan Serai melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Dan pada indikator Pelaporan, dalam melaporkan realisasi APBDes Pangkalan Serai, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kampar. Kemudian untuk laporan realisasi dana desa kepada masyarakat desa Pangkalan Serai, penginformasiannya hanya disampaikan lewat papan mading saja. Semuanya bisa melihat didepan kantor desa Pangkalan Serai bahwa ada papan informasi, pemerintah desa selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang dilaksanakan per tahunnya oleh Pemerintah Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Selanjutnya berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi antara aparat pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Serai. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana tersebut harus di musyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan desa.

2. Pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah desa Pangkalan Serai dengan masyarakat terkait laporan realisasi pengelolaan APBDes Pangkalan Serai.
3. Pemerintah Desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan kondisi penganggaran atau masuknya anggaran, pencairannya melalui tiga tahap. Sehingga Pemerintah Desa Pangkalan Serai hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, peneliti telah menarik kesimpulan bahwa dari segi Perencanaan, Raperdes yang di susun setiap tahunnya di Desa Pangkalan Serai, prosesnya terlebih dahulu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus. Kemudian dari segi Pelaksanaan, Pemerintah Desa Pangkalan Serai selalu melakukan pengeluaran/belanja ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa Pangkalan Serai. Selanjutnya dari segi Penatausahaan, Pemerintah Desa Pangkalan Serai sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan baik. Akan tetapi, Pemerintah Desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku setiap bulan, melainkan hanya setiap akhir tahun. Dan dari segi Pelaporan, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, yang digabung dalam per tiga semester dan dilaporkan melalui kecamatan, lalu di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar.

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yaitu :

- 1) Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Serai. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana tersebut harus di musyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan desa.
- 2) Pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah desa Pangkalan Serai dengan masyarakat terkait laporan realisasi pengelolaan APBDes Pangkalan Serai.
- 3) Pemerintah Desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan kondisi penganggaran atau masuknya anggaran, pencairannya melalui tiga tahap. Sehingga Pemerintah Desa Pangkalan Serai hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan Pemerintah Desa Pangkalan Serai melakukan komunikasi dan penyebarluasan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan di Desa Pangkalan Serai.

2. Disarankan Pemerintah Desa Pangkalan Serai bersikap transparan dalam mengelola APBDes, yaitu dengan mengadakan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa Pangkalan Serai dengan masyarakat terkait laporan realisasi pengelolaan APBDes Pangkalan Serai, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan APBDes Pangkalan Serai.
3. Disarankan Pemerintah Desa Pangkalan Serai melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, sehingga pengelolaan keuangan desa Pangkalan Serai menjadi tampak jelas dan transparansi, dan dapat dilakukan evaluasi setiap bulannya apabila terjadi kesalahan input atau defisit anggaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Surya. 2012. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ali, Faried. 2014. *Ilmu Administrasi*. Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka.
- Hardyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Melayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Sadikin. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2008. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa. 2016. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurcholis, Hanif. 2017. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Saifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samsudin, Sadili. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, Djam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman. 2015. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafie, Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

#### **Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa.

RPJM Desa Pangkalan Serai.